



---

# **PENGARUH PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN**

## **(Studi Empiris pada Pemerintah Kota Yogyakarta)**

Ageng Trimukti Fadhilah

Sarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, DIY, Indonesia

---

### **ARTICLE INFO**

**Keywords:**

Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Transparansi Pengelolaan Keuangan, Kinerja Pemerintah.

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the influence of the role of the Government's Internal Supervisory Apparatus, Accountability and Transparency of Financial Management on Government Performance in government of Yogyakarta city. This Study using multiple regression analysis in SPSS.22. Sample in this study is the Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) is located in the city government of Yogyakarta. In this study a sample of 147 people, taken with purposive sampling method consisting of: Head of Department, Secretary, Financial Officer at SKPD government of Yogyakarta city.

---

## **PENDAHULUAN**

Tingginya berbagai asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan hasil kinerja pemerintah secara maksimal (Auditya *et al.*, 2013). Padahal, otonomi daerah sudah berjalan cukup lama, yakni sekitar 17 tahunan. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No 18 Tahun 2016.

Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya konsep otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintahan, termasuk pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat (Wiguna *et al.*, 2015). Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa terdapat kaitan antara penerapan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik. Wiguna *et al.*, (2015) dalam penelitiannya membuktikan secara empiris bahwa pengawasan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Ismiarti (2013) dalam penelitiannya menghasilkan temuan bahwa implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Auditya *et al.*, (2015).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Auditya *et al.*, (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD, semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam SKPD maka akan semakin meningkatkan kinerja. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam hal kinerja Pemerintah yang dinilai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil program kerja (menpan.go.id). Namun dibalik opini yang diberikan oleh BPK, pemerintah kota Yogyakarta masih memiliki masalah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ditemukan beberapa temuan pada tahun anggaran 2016.

Temuan tersebut diantaranya temuan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI), yang terdapat pada rekonsiliasi data pajak yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), serta sistem informasi manajemen barang daerah yang berada di bawah Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) (jogja.antaranews.com).

Sebelumnya penelitian mengenai peran APIP dan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan Darmawiguna (2017) yang meneliti mengenai pengaruh adanya peran aparat pengawas intern pemerintah yang berpengaruh terhadap penerapan *good governance* dan implikasinya pada kinerja pemerintah Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran APIP berpengaruh positif secara simultan terhadap penerapan *good governance* dan penerapan *good governance* pada kinerja pemerintah.

Penelitian terdahulu yang juga telah dilakukan oleh Fifit dan Nadirsyah (2016) yang meneliti mengenai pengaruh dari adanya kegiatan pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang berdampak kepada peningkatan kinerja pemerintah daerah yang berada di kabupaten Aceh Barat Daya. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi keuangan pengelolaan secara simultan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Abdya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah, diantaranya adalah peran APIP, transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan yang terdapat pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purnama dan Nadirsyah (2016) dengan memperluas lingkup variabel pengawasan dengan Peran APIP yang tidak hanya kegiatan pengawasan (*assurance activity*) melainkan juga *advisory activity* dan *anti corruption activity*.

Penelitian mengenai kinerja pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada bidang teoritis, yakni terkait pengembangan isu tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam hal pengawas yang telah berubah paradigma dari pengawas yang hanya sekedar mencari-cari kesalahan (*watchdog*) menjadi pengawas yang turut berpartisipasi dalam menanggulangi adanya kesalahan atau kecurangan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui *Assurance Activity*, *Anti Corruption Activity* dan *Advisory Activity*. Serta penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat bidang teoritis dalam hal transparansi dan akuntabilitas guna mencapai kinerja pemerintah yang memuaskan serta dapat menambah pengetahuan serta literatur pada masalah sejenis.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 1. Teori Stewardship

Menurut Donaldson dan Davis (1991) teori stewardship adalah teori dimana para manajemen memiliki motivasi dan keinginan kuat untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan masyarakat luas. Menurut Putro (2013), teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan masyarakat. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Prima (2012), *stewardship theory* menyatakan bahwa para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini didasarkan pada aspek psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai penanggungjawab termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku eksekutif tidak akan meninggalkan organisasinya sebab mereka berusaha mencapai sasaran organisasinya. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. *Stewardship theory* memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya dan *shareholder* pada khususnya (Prima, 2012).

### 2. Teori Agensi

Menurut Lane (2000) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa rerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Mardiasmo (2002) menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa, pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat *principal* akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). *Information asymmetry* merupakan keadaan dimana *agent* memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak *principal*. Asimetri informasi muncul ketika *agent* lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan *principal* dan *stake holder* lainnya. Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pemerintah selaku agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi *information asymmetry* (Setiawan, 2012).

### 3. Good Government Governance

Menurut Yusniar, dkk (2016), *Good Government Governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas organisasi guna mewujudkan nilai-nilai atau tata kelola keuangan pemerintahan yang baik dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan publik berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Indikator yang meliputi elemen-elemen penting dalam *good governance* adalah: (a)Transparansi,(b)Akuntabilitas, (c)Pertanggungjawaban, (d) Keadilan .

### 4. New Public Management

*New Public Management* (NPM) merupakan sistem manajemen administrasi yang paling aktual digunakan di seluruh dunia. NPM merupakan suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti *controlling*, *benchmarking* dan *lean manajemen*. NPM merupakan suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern (Ulum dan Sofyani, 2016).

Menurut Hood (1991) konsep *New Public Management* memiliki tujuh komponen utama, yaitu:

a) Manajemen profesional di sektor publik

*New Public Management* menghendaki organisasi sektor publik dikelola secara profesional. Manajemen profesional mensyaratkan ditentukannya batasan tugas pokok dan fungsi serta deskripsi kerja yang jelas.

b) Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja

*New Public Management* mensyaratkan organisasi memiliki tujuan yang jelas dan ada penetapan target kinerja.

c) Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome

Dalam konsep *New Public Management*, semua sumber daya organisasi harus dikerahkan dan diarahkan untuk mencapai target kinerja

d) Pemecahan unit-unit di sektor publik

NPM menghendaki adanya desentralisasi, devolusi dan pemberian wewenang yang lebih besar kepada bawahan dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dan memangkas kelambanan birokrasi.

e) Menciptakan persaingan di sektor publik

*New Public Management* menyatakan organisasi sektor publik perlu mengadopsi mekanisme pasar dan menciptakan persaingan. Tujuan menciptakan persaingan di sektor publik adalah untuk menghemat biaya. Untuk itu dilakukan mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi. Beberapa tugas pelayanan publik dapat diberikan kepada pihak swasta jika memang hal ini lebih menghemat biaya dan menghasilkan kinerja yang berkualitas. Selain itu, manfaat lainnya adalah mendorong sektor swasta dan ketiga.

f) Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik

Konsep *New Public Management* berasumsi bahwa praktik manajemen di sektor swasta jauh lebih baik dibandingkan manajemen sektor publik. dalam hal penilaian kinerja, sistem kompensasi dan promosi didasarkan kinerja, manajemen biaya, struktur yang fleksibel, sistem akuntansi, dan penganggaran yang lebih maju.

g) Penekanan pada disiplin dan penghematan lebih besar dalam menggunakan sumber daya.

*New Public Management* mensyaratkan organisasi sektor publik dapat memberikan perhatian yang besar terhadap penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien.

## 5. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (menpan, 2007). Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah memerlukan sistem pengelolaan keuangan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar potensi terjadinya kecurangan-kecurangan dan penyimpangan semakin kecil serta adanya kejelasan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan (Sumarsono, 2010).

Menurut Ulum dan Sofyani (2016) pengukuran kinerja adalah cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut.

## 6. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, merupakan hal yang diinginkan oleh semua pihak. Dukungan dan peran dari berbagai pihak dibutuhkan agar pemerintah tetap dalam ketentuan-ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan. Salah satu yang memiliki peran tersebut adalah APIP. APIP sebagai pengawas intern dari pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Peran APIP sebelumnya hanya menjadi pengawas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Namun dewasa ini, APIP mendapat fungsi yang lebih luas yaitu sebagai pengendali, pengarah serta pengawas dari seluruh proses untuk mendukung pelaksanaan strategi agar tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tujuan dan visi misi yang ada. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemerintahan harus mengacu pada prinsip-prinsip yang berlaku dan ketentuan yang ada dalam organisasi auditor internal pemerintahan (Basuki, 2016).

Peran APIP semakin lama semakin strategis. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintah yang bersih (*clean government*) (Standar Audit Intern Pemerintah).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut diperlukan peran APIP yang efektif, Peran yang dilakukan APIP tidak hanya melakukan pengawasan dan mencari-cari kesalahan (*watch dog*) melainkan telah diperluas yaitu dalam wujud:

- a. *Assurance Activity* yaitu kegiatan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Peran *Assurance* tidak hanya audit ketaatan tetapi juga mencakup audit kinerja, audit investigasi, revidu, evaluasi, pemantauan dan sebagai *compliance office risk management*.
- b. *Anti corruption Activity* yaitu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dengan cara penerapan *risk based audit planning* termasuk memperhatikan kebutuhan manajemen dalam pengendalian risiko SKPD
- c. *Advisory Activity* merupakan kegiatan memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah meliputi asistensi penyusunan LKPD, pendampingan audit BPK, pembimbingan dan konsultasi manajemen risiko, pengendalian intern dan konsultasi pengadaan barang dan jasa (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia).

Menurut Yusmalizar (2014), pengawasan yang terpadu oleh APIP menjadi alat yang efektif untuk membangun dan meningkatkan mutu dari pemerintahan, melalui pendampingan, pengendalian dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Penelitian Darmawiguna (2017) menunjukkan bahwa peran APIP berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Penelitian Purnama dan Nadirsyah (2016) turut mendukung hasil yang ada, dimana pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan membuktikan secara empiris peran aparat pengawas intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>1</sub>: Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

## 7. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, dimana hasil pertanggungjawaban laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam menilai baik buruknya kinerja pemerintah. Semakin akuntabel tingkat pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula tingkat pencapaian kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik terkait pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang telah dilakukan, dimana akuntabilitas sendiri merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka hal ini menjadi kewajiban bagi pelaksana pemerintahan (Purnama dan Nadirsyah, 2016).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meliputi proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Wiguna *et al.*, (2015) menyatakan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut juga diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh Auditya (2015) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pada pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap peningkatan kinerja yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kinerja akan dicapai secara maksimal apabila akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan dengan maksimal. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan membuktikan secara empiris akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>2</sub> : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

## **8. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Selain pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah juga merupakan bagian terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi kepada publik, sehingga publik dapat mengetahui, memberi kritik dan saran, serta mengevaluasi kinerja pemerintah sehingga pemerintah akan lebih hati-hati dalam bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian akan melahirkan kinerja pemerintah yang lebih baik (Purnama dan Nadirsyah, 2016)

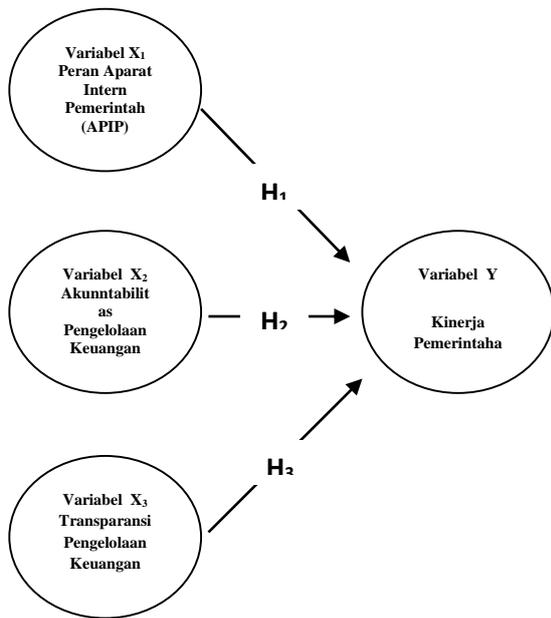
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah terhadap pemberian informasi mengenai pengelolaan sumber daya, baik sumberdaya alam, manusia, maupun sumberdaya finansial. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja, karena transparansi termasuk dalam indikator dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). Pemerintah wajib menyajikan informasi untuk pihak yang berkepentingan, dengan tujuan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam bidang, ekonomi, politik dan sosial (Nadia Garini, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2015) menyatakan bahwa tindakan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi yang dilakukan adalah suatu bentuk keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke arah yang lebih baik. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiwirya dan Sudana (2015) Semakin memperkuat hasil penelitian lainnya dimana hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan membuktikan secara empiris transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>3</sub> : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah DIY.

## METODE PENELITIAN



Gambar 1. Model Penelitian

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terletak di Kota Yogyakarta yang terdiri dari 37 Dinas/Badan, Kantor, dan Sekretariat. Responden untuk mewakili sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Instansi, Pejabat pengelola keuangan, dan Sekretaris dari setiap SKPD yang menjadi sampel penelitian. Para responden ini dipilih karena mereka merupakan pihak yang mempunyai peran dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

### Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh SKPD di Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 34 SKPD. Kuesioner yang digunakan untuk pengambilan data akan dikirimkan kepada seluruh sampel. Masing-masing SKPD akan didistribusikan sebanyak 5 kuesioner. Peneliti bermaksud menggunakan 34 sampel yang diambil dengan metode *purposive sampling*, yaitu dengan metode pengambilan sampel yang didasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel tersebut adalah:

1. Responden merupakan pegawai SKPD.
2. Responden telah menjabat sebagai pegawai SKPD sekurang-kurangnya 1 tahun.
3. Responden menduduki jabatan sebagai kepala instansi, sekretaris atau pejabat pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pejabat/pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban di setiap SKPD dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Indikator untuk mengukur variabel ini yaitu berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh Acintya (2015) yang meliputi: Pengelolaan APBD berdasarkan penerapan *value for money*, pengelolaan APBD yang adil dan merata, memperjuangkan aspirasi masyarakat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Maasing-masing diukur dengan skala Likert 1-5 yang terdiri dari: (1) Sangat Tidak Setuju; (2) Tidak Setuju; (3) Ragu-ragu; (4) Setuju; (5) Sangat Setuju (Sugiyono, 2014).

## 2. Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah peran aparat pengawas intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert 1-5 yang terdiri dari: (1) Sangat Tidak Setuju; (2) Tidak Setuju; (3) Ragu-ragu; (4) Setuju; (5) Sangat Setuju (Sugiyono, 2014).

### a) Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Bentuk Peran dari APIP mencakup pendampingan, pemberian nasihat dan pengawasan terhadap pejabat yang langsung terlibat dalam pengelola keuangan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku (Baswir, 1999). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu berdasarkan penjelasan yang terdapat pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2013) yang meliputi: *assurance activities*, *advisory activities* dan *anti-corruption activities*. Masing-masing diukur dengan menggunakan skala likert 1-5.

### b) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mahmudi (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas finansial/keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efisiensi, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh Krina (2003) yang meliputi : Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Kebijakan dan Akuntabilitas Program. Masing-masing diukur dengan menggunakan skala likert 1-5.

### c). Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Adisasmita, 2011:39). Selanjutnya, Mardiasmo (2004:30) menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan lainnya yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. Dalam pengambilan keputusan tersebut diperlukan informasi akuntansi salah satunya berupa laporan keuangan.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kemampuan pejabat/pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD di pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempublikasikan dan mempertanggungjawabkan hasil laporan keuangan kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh Krina (2003) yang meliputi: Penyediaan akses informasi yang mudah, menyediakan informasi yang jelas mengenai pertanggungjawaban dan peningkatan kerjasama dengan media massa. Masing-masing diukur dengan menggunakan skala likert 1-5.

## H. Uji Hipotesis dan Analisis Data

### 1. Model Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian terdapat dua model penelitian.

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel Peran Aparat Intern Pemerintah

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel Akuntabilitas

$\beta_3$  = Koefisien regresi variabel Transparansi

$X_1$  = Peran Aparat Intern Pemerintah

$X_2$  = Akuntabilitas

$X_3$  = Transparansi

$\epsilon$  = Error of estimation

### 2. Uji Hipotesis

#### a) Uji signifikan simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Jika hasil analisis menunjukkan hasil nilai sig  $f < \alpha$  0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2016).

#### b) Uji signifikan parsial (Uji t)

Untuk mengetahui pengaruh dari masing masing variabel independen terhadap dependen dapat menggunakan uji t (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Kriteria

penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai sig  $< \alpha$  (0,05) dan koefisien regresi searah dengan hipotesis.
- 2) Jika nilai sig  $> \alpha$  (0,05) dan tidak searah dengan hipotesis maka hipotesis ditolak.

#### c) Uji Koefisien determinasi

Nilai koefisien determinasi dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kebenaran prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan. Nilai adjusted R square dapat menunjukkan tingkat kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabilitas variabel terikat atau dependen. Besarnya koefisien determinasi dari 0 sampai 1. Apabila hasil analisis diketahui semakin mendekati 0 maka semakin kecil kemampuan menjelaskan. Sebaliknya, apabila hasil analisis diketahui semakin mendekati 1 maka semakin besar kemampuan menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian hipotesis:

Kode	Hipotesis	Hasil
H <sub>1</sub>	Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh secara positif terhadap Kinerja Pemerintah	<b>Diterima</b>
H <sub>2</sub>	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara positif terhadap Kinerja Pemerintah	<b>Diterima</b>
H <sub>3</sub>	Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara positif terhadap Kinerja Pemerintah	<b>Diterima</b>

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Peran APIP terhadap Kinerja Pemerintah**

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemerintahan harus mengacu pada prinsip-prinsip yang berlaku dan ketentuan yang ada dalam organisasi auditor internal pemerintahan (Basuki, 2016).

Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di kota Yogyakarta masih dianggap sebagai tokoh antagonis yang mencari celah kesalahan yang dilakukan SKPD/Unit Kerja. Selama ini hubungan yang terbangun antara APIP dan SKPD/Unit kerja masih satu arah, APIP masih menjadi *watch dog* yang secara reaktif mengungkap penyelewengan yang ada di SKPD.

Kapabilitas APIP di Yogyakarta saat ini menempati level 2, yaitu mampu menjalin proses sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi, dimana seharusnya pemerintah kota Yogyakarta dapat menempati level 3 yaitu mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern ([www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id))

Pada penelitian ini menguji keterkaitan antara peran aparat pengawas intern pemerintah dengan kinerja pemerintah. Peran APIP yang besar sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Semakin tinggi peran APIP maka akan semakin baik kinerja pemerintah.

Hasil penelitian pengaruh Peran APIP terhadap Kinerja Pemerintah dengan menggunakan uji signifikansi dan koefisien beta variabel menunjukkan bahwa Peran APIP akan meningkatkan dan memaksimalkan kinerja pemerintah kota Yogyakarta.

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi peran APIP maka semakin baik Kinerja Pemerintah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Darmawiguna (2017) yang menyatakan bahwa Peran APIP berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah.

Hasil tersebut diharapkan dapat memaksimalkan peran APIP di kota Yogyakarta, kemudian APIP dapat menempati level 3 dan mampu meningkatkan kinerja SKPD/Unit Kerja yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta.

### **2. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah**

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik terkait pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang telah dilakukan, dimana akuntabilitas sendiri merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka hal ini menjadi kewajiban bagi pelaksana pemerintahan (Purnama dan Nadirsyah, 2016).

Kota Yogyakarta pada tahun 2016 menurut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah III, pemerintahan kota Yogyakarta memperoleh predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas masih belum maksimal dipemerintahan kota Yogyakarta, dan juga pada 3 Kabupaten yang berada pada Provinsi DIY yaitu, Sleman, Kulon Progo dan Bantul (LAKIP, 2016).

Pada tahun 2017 kota Yogyakarta kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Walaupun memperoleh opini tertinggi, namun sejumlah permasalahan keuangan untuk tahun anggaran 2016 sempat menjadi temuan dari BPK dan berpotensi merugikan daerah. Sejumlah temuan tersebut diantaranya adalah tunggakan pajak reklame, tunggakan pajak

hotel, dan tunggakan retribusi sampah(Tribunnews,2016).

Pada penelitian ini menguji keterkaitan antara akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan kinerja pemerintah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan yang besar sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Semakin tinggi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan maka akan semakin baik kinerja pemerintah

Hasil penelitian pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah dengan menggunakan uji signifikansi dan koefisien beta variabel menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah akan meningkatkan dan memaksimalkan kinerja pemerintah kota Yogyakarta.

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan maka semakin baik Kinerja Pemerintah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Puranama dan Nadirsyah (2016) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah.

Hasil tersebut diharapkan pemerintah Kota Yogyakarta akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga tidak terdapat temuan-temuan yang merugikan negara dan mempertahankan predikat tertinggi yang telah diraih.

### **3. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah**

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi kepada publik, sehingga publik dapat mengetahui, memberi kritik dan saran, serta mengevaluasi kinerja pemerintah sehingga pemerintah akan lebih hati-hati dalam bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian akan melahirkan kinerja pemerintah yang lebih baik (Purnama dan Nadirsyah, 2016)

Pada tahun 2016 kota Yogyakarta kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Walaupun memperoleh opini tertinggi, namun sejumlah permasalahan transparansi pada tahun 2016 sempat menjadi temuan dari BPK dan berpotensi merugikan daerah. Sejumlah temuan tersebut diantaranya adalah operasi yang berbelit, suap, menyuap, tidak transparan.(Tribunnews,2016)

Penelitian ini menguji keterkaitan antara transparansi pengelolaan keuangan dengan kinerja pemerintah. Transparansi pengelolaan keuangan yang besar sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Semakin tinggi Transparansi Pengelolaan Keuangan maka akan semakin baik kinerja pemerintah

Hasil penelitian pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah dengan menggunakan uji signifikansi dan koefisien beta variabel menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan pemerintah akan meningkatkan dan memaksimalkan kinerja pemerintah kota Yogyakarta.

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin Transparansi Pengelolaan Keuangan maka semakin baik Kinerja Pemerintah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Puranama dan Nadirsyah (2016) yang menyatakan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah.

Hasil tersebut diharapkan pemerintah Kota Yogyakarta akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga tidak terdapat temuan-temuan yang merugikan negara dan mempertahankan predikat tertinggi yang telah diraih.

## **SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian pada hipotesis pertama yakni, peran APIP berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan diterima. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawiguna (2017) yang menyatakan bahwa peran APIP berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Semakin tinggi peran APIP terhadap suatu pemerintahan maka semakin tinggi pula kinerja yang dapat dihasilkan pemerintahan.
2. Hasil penelitian pada hipotesis kedua yakni, akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah diterima. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Purnama dan Nadirsyah (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu pemerintahan akan berpengaruh positif terhadap kinerjanya.
3. Hasil penelitian pada hipotesis ketiga yakni, transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah diterima. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Purnama dan Nadirsyah (2016) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan suatu pemerintahan akan berpengaruh positif terhadap kinerjanya.

### **B. Saran**

Berikut beberapa saran yang diberikan peneliti untuk penelitian – penelitian berikutnya:

4. Memperluas daerah pengamatan, yaitu tidak hanya berfokus pada kota Yogyakarta, agar penelitian lebih luas dan dapat melengkapi hasil penelitian di daerah lain.

1. Mengganti variabel yang terindikasi mempengaruhi kinerja pemerintah yang terdapat ada indikator *Good Government Governance* (GGG) karena meskipun dalam uji signifikansi simultan (Uji F) menunjukkan hasil bahwa peran APIP, akuntabilitas, transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, namun dalam pengujian determinasi menunjukkan nilai  $R^2$  rendah.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya meneliti peran APIP, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain.
2. Penelitian ini hanya berupa pengujian kuantitatif deskriptif sehingga jawaban responden kemungkinan berbeda jika dilakukan penelitian kembali sehingga tidak dapat digeneralisasikan jika diteliti di tempat lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmadi, A., Mahmuddin, M., & Rusmiyati. (2002). *Good Governance dan Penguatan Instistusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia*. Jakarta.
- Acintya, & Diah, I. G. (2015). Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Dalam Implementasi SAKIP dan Penerapan Good Governance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Adiwirya, Firdiansyah, M., & Putu, S. (2015). Akuntabilitas, Transparansi Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*.

- Basuki, A. T., & Nazaruddin, I. (2015). *Praktikum Statistik*. Yogyakarta.
- Darmawiguna, I. M. (2017). Pengaruh Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance dan Implikasinya pada Kinerja Pemerintah . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2172-2201.
- Garini, N. (2011). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
- Indonesia, A. A. (2013). Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- Mailoor, J. H., Sondakh, J. J., & Gamaliel, H. (t.thn.). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance. 82-94.
- Purnama, F., & Nadirsyah. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi(JIMEKA)*, 01-15.
- Rafar, T. M., Fahlevi, H., & Basri, H. (2015). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 64-71.
- Riswanto, N. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rudi, M. (2003). *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Singal, Y. I., Saerang, D. E., & Karamoy, H. (2016). Analisis Expection GAP Antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pemangku Kepentingan Mengenai Peran dan Independensi APIP dalam Pengawasan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 160-173.
- Ulum, I., & Sofyani, H. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Yusmalizar. (2014). Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Yusniyar, Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance dan Dampaknya pada Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 100-115.

